

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

Tahun **2025**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



disdukcapi@sambas.go.id



<https://disdukcapi.sambas.go.id/>



DisdukcapiSambas



Jalan Pembangunan Sambas Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 24 /DISDUKCAPIL/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
- b. bahwa untuk menyusun rencana kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);

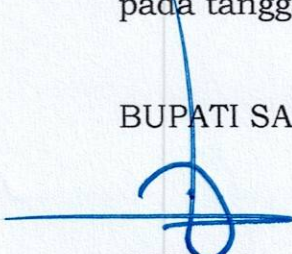
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI SAMBAS,



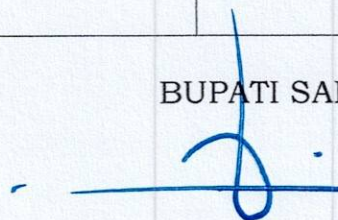
SATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 24 / DISDUKCAPIL / 2024
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Sekretaris
3.	3.1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4.	4.1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 4.2. RUSDIANA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5.	5.1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 5.2. MARLIANA, S.Sos/ Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	6.1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 6.2. ERNA SURIANI,SE / Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7.	7.1. DIVA LIANITA, SE / Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 7.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 7.3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

BUPATI SAMBAS,



SATONO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Perencanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sambas. Semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Sambas, 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Hj. WAHIDAH, SE, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680530 199403 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
 BAB III. TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	 47
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3 Program dan Kegiatan	50
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 60
BAB V. PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai organisasi perangkat daerah pada tahun 2024 ini Menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renja Disdukcapil) Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2024 4 Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Adapaun tujuan penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Merumuskan dan menetapkan program/kegiatan pembangunan Disdukcapil Kabupaten Sambas selama tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, renstra perangkat daerah, dengan renja K/L dan Renja prov/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, yang merupakan format Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 terkait pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan Tabel T-C.31 terkait review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 terkait Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
 - ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - ✓ Pencapaian SDGs,
 - ✓ Pengentasan kemiskinan,
 - ✓ Pencapaian NSPK dan SPM,
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - ✓ Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu terkait Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah baik program, kegiatan dan pagu indikatif.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah dilewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 di bawah ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 12 01	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 12 01	Kependudukan dan Pencatatan Sipil							9		
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.751.514.523,00	6.892.893.877,00	5.548.605.893,00	8.003.241.213,00	144,24	5.569.451.646,00	20.465.586.736,00	264,02
2 12 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.000.000,00	63.021.550,00	54.181.023,00	37.186.376,00	68,63	64.923.376,00	165.131.302,00	351,34
2 12 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	17.607.950,00	5.394.174,00	3.016.728,00	55,93	25.153.728,00	45.778.406,00	228,89
2 12 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	4.500.000,00	7.759.375,00	7.759.658,00	4.421.264,00	56,98	4.421.264,00	16.601.903,00	368,93
2 12 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	4.581.500,00	4.582.006,00	3.178.981,00	69,38	3.178.981,00	10.939.462,00	243,10
2 12 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	6.028.225,00	6.028.530,00	3.424.136,00	56,80	4.624.136,00	14.076.497,00	312,81
2 12 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	4.074.725,00	4.075.056,00	3.323.045,00	81,55	3.323.045,00	10.720.815,00	238,24
2 12 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan iktislar realisasi kinerja SKPD	4.500.000,00	4.378.875,00	4.379.343,00	2.551.259,00	58,26	3.751.259,00	10.681.393,00	237,36
2 12 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4.500.000,00	18.590.900,00	21.962.256,00	17.270.963,00	78,64	20.470.963,00	56.332.826,00	1.251,84

2	12	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu	3.652.356.329,00	2.881.682.594,00	2.689.423.247,00	3.730.348.862,00	138,70	3.293.704.353,00	9.905.735.809,00	271,21
2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3.340.356.329,00	2.718.243.519,00	2.510.439.393,00	3.560.623.694,00	141,83	3.123.979.185,00	9.402.846.398,00	281,49
2	12	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan	300.000.000,00	150.690.000,00	166.200.000,00	158.400.000,00	95,31	158.400.000,00	467.490.000,00	155,83
2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.000.000,00	3.566.625,00	3.566.820,00	3.053.720,00	85,61	3.053.720,00	9.674.065,00	241,85
2	12	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	4.000.000,00	5.140.350,00	5.174.633,00	3.935.198,00	76,05	3.935.198,00	13.010.746,00	325,27
2	12	01	2	02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	4.000.000,00	4.042.100,00	4.042.401,00	4.336.250,00	107,27	4.336.250,00	12.714.600,00	317,87
2	12	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu	13.000.000,00	10.947.350,00	11.082.270,00	11.188.319,00	100,96	11.714.819,00	33.850.488,00	280,39
2	12	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBM	5.000.000,00	2.822.250,00	2.822.482,00	3.334.877,00	118,15	3.861.377,00	10.018.504,00	200,37
2	12	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	3.000.000,00	2.969.500,00	2.969.781,00	2.328.345,00	78,40	2.328.345,00	7.626.190,00	254,21
2	12	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	5.000.000,00	5.155.600,00	5.290.007,00	5.525.097,00	104,44	5.525.097,00	16.205.794,00	324,12
2	12	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu	1.000.000.000,00	769.603.451,00	791.434.648,00	778.409.037,00	98,35	780.049.429,00	2.328.061.917,00	232,81
2	12	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	150.000.000,00	-	19.839.264,00	41.490.000,00	209,13	42.390.000,00	83.880.000,00	55,92
2	12	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian	850.000.000,00	769.603.451,00	771.595.384,00	736.919.037,00	95,51	737.659.429,00	2.244.181.917,00	264,02
2	12	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu	1.070.158.194,00	966.496.111,00	975.565.227,00	982.823.614,00	100,74	775.418.748,00	2.724.738.473,00	254,61
2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	120.000.000,00	122.034.950,00	122.191.336,00	100.936.810,00	82,61	100.936.810,00	323.908.570,00	269,92
2	12	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	130.000.000,00	178.925.850,00	179.039.316,00	129.358.446,00	72,25	125.682.884,00	433.967.180,00	333,82
						Retribusi sampah									14

2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	85.173.575,00	86.076.489,00	88.988.684,00	103,38	87.921.599,00	262.083.858,00	275,88
2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	106.316.875,00	106.438.656,00	86.264.134,00	81,05	66.264.200,00	258.845.209,00	368,95
2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	4.800.000,00	4.890.000,00	4.000.000,00	81,80	4.890.000,00	13.690.000,00	273,80
2	12	01	2	06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	317.424.836,00	317.338.902,00	386.019.469,00	121,64	172.438.384,00	875.882.689,00	194,64
2	12	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	151.820.025,00	159.590.528,00	187.256.071,00	117,34	217.284.871,00	556.360.967,00	278,18
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.177.300,00	422.000.000,00	726.069.750,00	172,05	60.000.000,00	1.460.247.050,00	130,38
2	12	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	45.120.000,00	400.000.000,00	426.990.000,00	106,75	5.000.000,00	477.110.000,00	954,22
2	12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel	172.941.300,00	22.000.000,00	16.372.500,00	74,42	5.000.000,00	194.313.800,00	176,65
2	12	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	456.116.000,00	-	282.707.250,00	100,00	50.000.000,00	788.823.250,00	82,17
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.021.931,00	401.331.742,00	282.669.347,00	70,43	334.073.400,00	866.764.678,00	194,78
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	4.900.000,00	4.900.000,00	4.400.000,00	89,80	5.390.000,00	14.690.000,00	146,90
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	245.121.931,00	396.431.742,00	278.269.347,00	70,19	328.683.400,00	852.074.678,00	195,88
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.018.740,00	166.792.150,00	1.388.694.287,00	832,59	204.200.500,00	2.834.913.527,00	1.133,97
2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dinas/operasional yang terawat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	70.985.750,00	73.523.150,00	100.593.900,00	136,82	76.171.500,00	247.751.150,00	215,44
2	12	01	2	09	06	Operasional atau Lapangan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	53.224.000,00	53.750.000,00	53.686.000,00	99,88	53.750.000,00	160.660.000,00	229,51
2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	99.195.000,00	9.999.000,00	105.905.000,00	1.059,16	9.999.000,00	215.099.000,00	1.433,99
2	12	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	1.018.613.990,00	29.520.000,00	1.128.509.387,00	3.822,86	64.280.000,00	2.211.403.377,00	4.422,81
2	12	01	2	13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	34.924.850,00	36.795.586,00	65.851.621,00	178,97	45.367.021,00	146.143.492,00	94,90
2	12	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	31.101.100,00	32.549.166,00	61.890.509,00	190,14	41.405.909,00	134.397.518,00	89,60
2	12	01	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)	3.823.750,00	4.246.420,00	3.961.112,00	93,28	3.961.112,00	11.745.974,00	293,65

[illegible]

2	12	03	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil	Pelayanan	300.000.000,00	214.469.299,00	220.000.000,00	186.602.871,00	84,82	220.001.470,00	621.073.640,00	207,02
2	12	03	2	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	hasil dokumen pelayanan	50.000.000,00	45.000.255,00	20.000.000,00	20.000.640,00	100,00	20.000.640,00	85.001.535,00	170,00
2	12	03	2	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil pencatatan pelayanan	hasil dokumen pelayanan	250.000.000,00	169.469.044,00	200.000.000,00	166.602.231,00	83,30	200.000.830,00	536.072.105,00	214,43
2	12	03	2	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan	467.000.000,00	208.596.049,00	145.000.000,00	225.275.869,00	155,36	145.000.150,00	578.872.068,00	123,96
2	12	03	2	02	Koordinasi dengan Kantor yang menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten /Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama Kabupaten /Kota dan pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	hasil laporan	50.000.000,00	20.000.079,00	20.000.000,00	20.000.030,00	100,00	20.000.030,00	60.000.139,00	120,00
2	12	03	2	04	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	hasil laporan	267.000.000,00	163.733.051,00	100.000.000,00	156.085.746,00	156,09	100.000.046,00	419.818.843,00	157,24
2	12	03	2	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	hasil laporan	150.000.000,00	24.862.919,00	25.000.000,00	49.190.093,00	196,76	25.000.074,00	99.053.086,00	66,04
2	12	03	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan	75.000.000,00	25.000.199,00	25.000.000,00	-	-	25.000.019,00	50.000.218,00	66,67
2	12	03	2	03	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	hasil laporan	75.000.000,00	25.000.199,00	25.000.000,00	-	-	25.000.019,00	50.000.218,00	66,67
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Organisasi Perangkat Daerah 2. Persentase Inovasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Persentase Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	1.491.000.000,00	1.158.431.512,00	455.000.000,00	532.699.522,00	117,08	686.281.516,00	2.377.412.550,00	159,45	

2	12	04	2	03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	65.085.919,00	125.000.000,00	118.097.399,00	94,48	120.000.346,00	303.183.664,00	242,55
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar OPD							
2	12	04	2	03	06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakata dan Perguruan Tinggi	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	82.090.204,00	25.000.000,00	25.806.159,00	103,22	25.806.159,00	133.702.522,00	89,14
2	12	04	2	03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen kerjasama organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	17.632.069,00	30.000.000,00	74.302.365,00	247,67	49.999.897,00	141.934.331,00	141,93
2	12	04	2	04	01	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Komunikasi, Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.408.925,00	20.000.000,00	19.511.596,00	97,56	19.511.596,00	58.432.117,00	58,43
2	12	04	2	04	02	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	17.047.600,00	25.000.000,00	15.752.262,00	63,01	25.063.999,00	57.863.861,00	77,15
2	12	04	2	04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	17.047.600,00	25.000.000,00	15.752.262,00	63,01	25.063.999,00	57.863.861,00	77,15
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	93.508.439,00	80.000.000,00	62.958.555,00	78,70	100.000.000,00	256.466.994,00	128,23
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	93.508.439,00	80.000.000,00	62.958.555,00	78,70	100.000.000,00	256.466.994,00	128,23
2	12	05	2	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	41.876.569,00	40.000.000,00	30.861.800,00	77,15	50.000.000,00	122.738.369,00	122,74
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2							
2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	51.631.870,00	40.000.000,00	32.096.755,00	80,24	50.000.000,00	133.728.625,00	133,73

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan beberapa indikator tahun 2024 antara lain :

1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan.
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.
3. Cakupan penerapan SIAK Se-Kabupaten Sambas.
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 maka ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. *Input* (masukan);
2. *Output* (keluaran);
3. *Outcomes* (hasil);
4. *Benefit* (manfaat);
5. *Impact* (dampak).

Indikator *input* adalah segala yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator *output* adakag segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator *benefit* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah

beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka waktu menengah dan jangka Panjang.

Indikator *impact* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dapat juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka Panjang. Indikator *impact* ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sectoral, regional dan nasional.

Dari penetapan strategis yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2025 sebagian besar meliputi lima jenis indikator yaitu *input*, *output*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*.

Sedangkan untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dari capaian program kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) setidaknya adalah indikator kinerja *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat capaian kinerjanya pada table berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,80	85,51	99,66
		Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	49,72	68,21	137,21
		Cakupan penerapan SIAK Se-Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05
		Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00	15,00	75,00

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel T.C.30 di bawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

INDIKATOR		TARGET RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH							REALISASI CAPAIAN (%)		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	s/d Juni 2024	2024	2025		
1	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	70,21	85,10	85,80	86,50	87,20	89,23	85,51	99,35	86,50	87,20		
2	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	51,55	48,68	49,72	50,83	52,17	53,83	68,21	135,53	50,83	52,17		
3	Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	100,00	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	100,00	83,38	99,95	99,95		
4	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	70,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	12,5	20,00	20,00		

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja.

Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.565.787.200 dengan realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.519.520.512,00 atau 99,56 %. Adapun Rincian penggunaan anggaran dan realisasi per program adalah sebagai berikut :

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.016.728,00	3.016.728,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.421.264,00	4.421.264,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.981,00	3.178.981,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.424.136,00	3.424.136,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.323.045,00	3.323.045,00	100,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.270.963,00	17.270.963,00	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.571.888.304,00	3.560.623.694,00	99,68
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.400.000,00	158.400.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.053.720,00	3.053.720,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.935.198,00	3.935.198,00	100,00
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.336.250,00	4.336.250,00	100,00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.861.377,00	3.334.877,00	86,36
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.328.345,00	2.328.345,00	100,00

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.525.097,00	5.525.097,00	100,00
D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.490.000,00	41.490.000,00	100,00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	737.787.109,00	736.919.037,00	99,88
E Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.936.810,00	100.936.810,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.362.884,00	129.358.446,00	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.121.599,00	88.988.684,00	99,85
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.264.200,00	86.264.134,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.005.000,00	4.000.000,00	99,88
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.296.384,00	386.019.469,00	99,93
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	187.350.071,00	187.256.071,00	99,95
F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.290.000,00	426.990.000,00	99,93
2	Pengadaan Mebel	18.900.000,00	16.372.500,00	86,63
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.090.000,00	282.707.250,00	96,46
G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.071.352,00	278.269.347,00	97,96
H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.449.900,00	100.593.900,00	99,16
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000,00	53.686.000,00	99,88
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.999.000,00	105.905.000,00	96,28

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.129.853.093,00	1.128.509.387,00	99,88
I	Penataan Organisasi			
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.890.676,00	61.890.509,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.961.112,00	3.961.112,00	100,00
JUMLAH		8.041.783.857,00	8.003.241.213,00	99,52
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	19.999.911,00	19.999.911,00	100,00
2	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	24.999.639,00	24.999.639,00	100,00
3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.165.044.492,00	1.164.844.860,00	99,98
4	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	19.999.927,00	19.979.137,00	99,90
B	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
1	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	228.992.074,00	228.926.074,00	99,97
2	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.992.950,00	24.992.900,00	100,00
C	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
1	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	24.999.961,00	24.999.961,00	100,00
JUMLAH		1.509.028.954,00	1.508.742.482,00	99,98
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
A	Pelayanan Pencatatan Sipil			
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.640,00	20.000.640,00	100,00
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	167.892.331,00	166.602.231,00	99,23
B	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	20.000.030,00	20.000.030,00	100,00
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	157.080.746,00	156.085.746,00	99,37
3	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.093,00	49.190.093,00	98,38
JUMLAH		414.973.840,00	411.878.740,00	99,25
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
A	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.000.306,00	99.589.206,00	99,59
B	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.596.697,00	84.542.379,00	99,94
C	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.536.766,00	95.098.156,00	99,54
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120.000.346,00	118.097.399,00	98,41
3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.806.159,00	25.806.159,00	100,00
4	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	74.999.897,00	74.302.365,00	99,07
5	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.511.596,00	19.511.596,00	100,00

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Menurut DPA	Realisasi	%
D	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.829.749,00	15.752.262,00	99,51
JUMLAH		536.281.516,00	532.699.522,00	99,33
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
A	Penyusunan Profil Kependudukan			
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	31.241.100,00	30.861.800,00	98,79
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	32.477.933,00	32.096.755,00	98,83
JUMLAH		63.719.033,00	62.958.555,00	98,81
TOTAL		10.565.787.200,00	10.519.520.512,00	99,56

Secara umum penggunaan anggaran APBD dalam Pencapaian Sasaran Strategis sangat berhasil dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,56 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah :

No.	BIDANG	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap adminduk dan pemahaman SDM Aparatur dan Tenaga Teknis di Tingkat	Perlu dilaksanakan pelayanan langsung kepada Masyarakat melalui jemput bola di tempat pelayanan

No.	BIDANG	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
		Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai aturan prosedur yang telah ditetapkan	publik, dan sosialisasi di Tingkat kecamatan, desa, PKK Desa, Pemuka Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain.
		Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dalam melakukan update data kependudukan	Perlu dilakukan sosialisasi tingkat kecamatan dandesa kepada masyarakat
		Masih adanya praktik percaloan.	Sosialisai dari dinas terkait pungli dan dari kepolisian
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta pencatatan sipil	Perlu sosialisasi yang berkelanjutan dari tingkat kecamatan dan desa kepada masyarakat
		Rendahnya pemahaman operator SIAK di kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan adminduk	Perlu sosialisasi dan bimtek yang berkelanjutan kepada operator dari tingkat kecamatan dan desa
		Operator kecamatan dan desa kurang memaksimalkan aplikasi SIAK dan PELAKAT yang sudah ada di kecamatan dan desa	Perlu sosialisasi dan bimtek yang berkelanjutan kepada operator dari tingkat kecamatan dan desa
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Adanya perubahan sistem informasi administrasi kependudukan dari SIAK terdistribusi menjadi SIAK Terpusat	Mengoptimalkan sistem informasi administrasi kependudukan dari SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat
		Belum semua petugas adminduk di desa dan kecamatan memahami SIAK terpusat dengan baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Sosialisasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

No.	BIDANG	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
		Kondisi Jaringan Komunikasi Data (Jamkordat) di daerah sambas yang kurang stabil	Mengoptimalkan jaringan data baik di kecamatan maupun di desa
4	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kurangnya dukungan biaya serta sarana dan prasarana kegiatan inovasi	Penambahan dana / anggaran untk kegiatan inovasi
		Kurangnya dukungan OPD terkait pemanfaatan data	Melakukan sosialisasi terhadap OPD terkait pemanfaatan data

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 semua dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat [ada table T.C.31 dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sambas

Rancangan Awal RKPD										Lembar dari.....		
No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	
1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3 Kab. Sambas	4 PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5 1 Tahun	6 7.767.014.523,00	7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8 Kab. Sambas	9 PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	10 1 Tahun	11 7.767.014.523,00	12	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		62.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		62.500.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	4.500.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	4.500.000,00		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4 Dokumen	20.000.000	Evaluasi Perangkat Daerah	Kinerja	Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat	4 Dokumen	20.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Panjang Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu	3.652.356.329	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Panjang Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.652.356.329,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Laporan	3.340.356.329	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Laporan	3.340.356.329,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	300.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	4.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Panjang Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu	13.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka Panjang Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD	1 Laporan	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan RKBMD	1 Laporan	5.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu	1.000.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu	1.000.000.000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	75 Orang	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	75 Orang	150.000.000.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kepegawaian	1 Dokumen	850.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kepegawaian	1 Dokumen	850.000.000.00
	Jumlah jasa tenaga non PNS	35 Orang					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Umum	1.070.158.194	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Umum	1.070.158.194.00
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	120.000.000	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	120.000.000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	130.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	130.000.000.00
	Retribusi sampah	12 Bulan					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	95.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	95.000.000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	70.158.194	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	70.158.194.00
Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	5.000.000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000.00

Penatausahaan Dinamis pada SKPD	Arsip	Jumlah penatausahaan dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000	Penatausahaan Dinamis pada SKPD	Arsip	Jumlah laporan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	Jumlah penatausahaan dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		1.120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		1.120.000.000,00			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000,00			
Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	110.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	110.000.000,00			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	960.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	960.000.000,00			
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	10.000.000,00			
Penyediaan Jasa Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	435.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	250.000.000,00			
Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	115.000.000	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	115.000.000,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	70.000.000,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	15.000.000,00			

Penatausahaan Dinamis pada SKPD	Arsip	Jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000	Penatausahaan Dinamis pada SKPD	Arsip	Jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.120.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000,00
Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	110.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	110.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	960.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	960.000.000,00
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	435.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	250.000.000,00
Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	115.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	70.000.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	15.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	50.000.000,00
	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi		154.000.000	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi		154.000.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	150.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	150.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)	1 Laporan	4.000.000,00
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		1.775.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		1.775.000.000,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.295.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.295.000.000,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	55.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	50.000.000	Penyelesaian Masalah Penduduk	Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	50.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.140.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.140.000.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	50.000.000,00

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	405.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	405.000.000,00	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	255.000.000,00	1 Laporan
Sosialisasi Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	150.000.000,00	1 Laporan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	75.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	75.000.000,00	
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	75.000.000,00	1 Laporan
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENCATATAN SIPIL	767.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENCATATAN SIPIL		
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000,00	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	50.000.000,00	1 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1 Dokumen	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil	250.000.000,00	1 Dokumen

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	467.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	467.000.000	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	467.000.000,00
Koordinasi dengan Kantor Kementerian Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadlian Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten /Kota dan pengadlian agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	50.000.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadlian Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	50.000.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten /Kota dan pengadlian agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1 Laporan	50.000.000,00
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	267.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	267.000.000	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	267.000.000,00
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	150.000.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	150.000.000	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	1 Laporan	150.000.000,00
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75.000.000	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75.000.000	Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		75.000.000,00
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	75.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	75.000.000	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Laporan	75.000.000,00
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.491.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.491.000.000	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1.491.000.000,00
Pengumpulan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyaljian database kependudukan	488.000.000	Pengumpulan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	488.000.000	Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyaljian database kependudukan		488.000.000,00

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 OPD	488.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 OPD	488.000.000,00
		1 Inovasi			Jumlah inovasi pelayanan adminduk	1 Inovasi	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		321.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		321.000.000,00
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	321.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	321.000.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		607.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		607.000.000,00
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	132.000.000	Fasilitasi terkait Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	132.000.000,00
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	2 Dokumen	125.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	2 Dokumen	125.000.000,00
	Jumlah pemanfaatan data kependudukan antar OPD	1 Dokumen	-		Jumlah pemanfaatan data kependudukan antar OPD	1 Dokumen	

	Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan	terkait Informasi Kependudukan	Jumlah laporan sosialisasi pengelolaan administrasi kependudukan	hasil terkait informasi kependudukan	1 Laporan	150.000.000,00					150.000.000,00	
	Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	dengan Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen kerjasama dengan kemasyarakatan dan perguruan tinggi	hasil terkait informasi kependudukan	1 Dokumen	100.000.000,00					100.000.000,00	
	Komunikasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah laporan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	hasil terkait informasi kependudukan	1 Laporan	100.000.000,00					100.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan		75.000.000,00					75.000.000,00	
	Bimbingan teknis terkait Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	hasil terkait informasi kependudukan	1 Laporan	75.000.000,00					75.000.000,00	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		200.000.000,00					200.000.000,00	
	Penyusunan Kependudukan	Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan		200.000.000,00					200.000.000,00	
	Penyediaan Kependudukan Kabupaten/Kota	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan semester 1	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	30 Buku	100.000.000,00					100.000.000,00	
			Jumlah buku Data Agregat Kependudukan semester 2	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	30 Buku	-						
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah buku perkembangan kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	50 Buku	100.000.000,00					100.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengintegrasikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD setelah dilakukan pengkajian/verifikasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dari hasil musrenbang tidak ada usulan yang diberikan oleh masyarakat kabupaten sambas terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sambas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4		5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Sambas	PERSENTASE PENUNJANG PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	CAPAIAN URUSAN DAERAH	1 Tahun	
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA - SKPD		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat		4 Dokumen	
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 Laporan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibayarkan	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	
3).	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan RKBMD	1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	
4).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	75 Orang	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan kepegawaian	1 Dokumen	
			Jumlah jasa tenaga non PNS	35 Orang	
5).	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	
			Retribusi sampah	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	13 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan		Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	

6).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	
7).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	390 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	
8).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	
9).	Penataan Organisasi		Jumlah Laporan Penataan Organisasi		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan LPPD/LKPJ/LAKIP (SKPD)	1 Laporan	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		PERSENTASE PENDAFTARAN PENDUDUK		
1).	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Dokumen	
	Penyelesaian Masalah Penduduk		Jumlah dokumen hasil penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	1 Dokumen	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1 Dokumen	

2).	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	
3).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase PENCATATAN SIPIL		
1).	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil,		
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1 Dokumen	
2).	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah laporan hasil koordinasi koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaten /Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1 Laporan	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	1 Laporan	
3).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Laporan	

4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
1).	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan		
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 OPD	
			jumlah inovasi pelayanan adminduk	1 Inovasi	
2).	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	
3).	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	2 Dokumen	
			Jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan antar OPD	1 Dokumen	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	
	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		Jumlah dokumen kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	1 Dokumen	
	Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		jumlah laporan hasil Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1 Laporan	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan		
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 Laporan	

5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		PERSENTASE ENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
1).	Penyusunan Pofil Kependudukan		Persentase Penyusunan Profik Kependudukan		
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 1	30 Buku	
			Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) semester 2	30 Buku	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	50 Buku	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Ada 7 agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam hal ini Visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Misi Presiden yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan;
4. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sambas, maka unit organisasi harus merumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Disdukcapil Kabupaten Sambas mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan Disdukcapil Kabupaten Sambas adalah **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan:.**

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Disdukcapil Kabupaten Sambas “Meningkatnya kualitas dan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 pada misi I yaitu :

VISI RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Berkemandirian, Maju dan Berkelanjutan.

MISI 1	: Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
TUJUAN RPJMD	: Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
TUJUAN OPD	: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan.
SASARAN RPJMD	: Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
SASARAN OPD	: 1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk; 2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil; 3. Meningkatkan pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan data dan inovasi.
INDIKATOR SASARAN RPJMD	: Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Adminduk.
INDIKATOR SASARAN OPD	: 1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan; 2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk; 3. Cakupan penerapan SIAK Se-Kabupaten Sambas; 4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2025 sebanyak 5 program dan 20 kegiatan dan 58 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Kegiatan dan Sub Kegiatan

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	62.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	4.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	4.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp	4.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp	4.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4.500.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	20.000.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.652.356.329,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.340.356.329,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	300.000.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	4.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	4.000.000,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	13.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	3.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	5.000.000,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	1.000.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	150.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	850.000.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.070.158.194,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	120.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	130.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	95.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	70.158.194,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	450.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	200.000.000,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.120.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	50.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Rp	110.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	960.000.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	445.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	435.000.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	250.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	115.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	70.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	15.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	50.000.000,00

9.	Penataan Organisasi	Rp	154.000.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp	150.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	4.000.000,00
10.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	1.295.000.000,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp	55.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Penduduk	Rp	50.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	1.140.000.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp	50.000.000,00
11.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp	405.000.000,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp	255.000.000,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp	150.000.000,00
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp	75.000.000,00
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Rp	75.000.000,00
13.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	300.000.000,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp	50.000.000,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	250.000.000,00
14.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp	467.000.000,00
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Rp	50.000.000,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp	267.000.000,00
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Rp	150.000.000,00
15.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp	75.000.000,00
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Rp	75.000.000,00
16.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyeajian Database Kependudukan	Rp	488.000.000,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp	488.000.000,00

17.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	321.000.000,00
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan , Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	321.000.000,00
18.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	607.000.000,00
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	132.000.000,00
	Penyelenggaraan Pemanfaata Data Kependudukan	Rp	125.000.000,00
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	150.000.000,00
	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp	100.000.000,00
	Komunikasi, Informasi, Edukasi, Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Rp	100.000.000,00
19.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	75.000.000,00
	Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Rp	75.000.000,00
20.	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp	200.000.000,00
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp	100.000.000,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp	100.000.000,00
	TOTAL	Rp	12.075.014.523,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sambas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel T.C.33. dibawah ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sambas
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode		urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 12 01.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sambas		7.767.014.523,00				8.523.715.974,00
2 12 01.2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62.500.000,00				68.750.000,00
2 12 01.2 01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	DAU		1 Dokumen	22.000.000,00
2 12 01.2 01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	4.500.000,00	DAU		1 Dokumen	4.950.000,00
2 12 01.2 01	03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	4.500.000,00	DAU		1 Dokumen	4.950.000,00
2 12 01.2 01	04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD		1 Dokumen	4.500.000,00	DAU		1 Dokumen	4.950.000,00
2 12 01.2 01	05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	4.500.000,00	DAU		1 Dokumen	4.950.000,00
2 12 01.2 01	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 Laporan	4.500.000,00	DAU		1 Laporan	4.950.000,00
2 12 01.2 01	07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat		4 Dokumen	20.000.000,00	DAU		4 Dokumen	22.000.000,00
2 12 01.2 02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.652.356.329,00				4.017.591.961,00
2 12 01.2 02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN		26 Laporan	3.340.356.329,00	DAU		26 Laporan	3.674.391.961,00
2 12 01.2 02.	03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi penanggungjawaban honorarium keuangan yang dikelola yang dibayarkan		1 Laporan	300.000.000,00	DAU		1 Laporan	330.000.000,00

2	12	01.	2	02.	05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	DAU		1 Laporan	4.400.000,00
2	06.	01.	2	02.	07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	DAU		1 Laporan	4.400.000,00
2	06.	01.	2	02.	08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.000.000,00	DAU		1 Laporan	4.400.000,00
2	12	01.	2	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.000.000,00	-			14.300.000,00
2	12	01.	2	03.	01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBM	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.500.000,00
2	12	01.	2	03.	05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	DAU		1 Laporan	3.300.000,00
2	12	01.	2	03.	06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	DAU		1 Laporan	5.500.000,00
2	12	01.	2	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.000.000.000,00				1.100.000.000,00
2	12	01.	2	05.	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	75 Orang	150.000.000,00	DAU		75 Orang	165.000.000,00
2	12	01.	2	05.	03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian	1 Dokumen	850.000.000,00	DAU		1 Dokumen	935.000.000,00
2	12	01.	2	06.		0	Jumlah jasa tenaga non PNS	35 Orang	-				
2	12	01.	2	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.070.158.194,00				1.167.174.013,00
2	12	01.	2	06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	120.000.000,00	DAU		10 Jenis	122.000.000,00
2	12	01.	2	06.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga / kebersihan kantor	24 Jenis	130.000.000,00	DAU		24 Jenis	143.000.000,00
2	12	01.	2	06.	04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK)	48 Jenis	95.000.000,00	DAU		48 Jenis	104.500.000,00
2	12	01.	2	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	70.158.194,00	DAU		13 Jenis	77.174.013,00
2	12	01.	2	06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Jumlah rekening bahan bacaan	3 Rekening	5.000.000,00	DAU		3 Rekening	5.500.000,00

2	12	01.	2	06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000,00	DAU		12 Laporan	495.000.000,00
2	12	01.	2	06.	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	DAU		1 Laporan	220.000.000,00
2	12	01.	2	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.120.000.000,00				1.232.000.000,00
2	12	01.	2	07.	02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	50.000.000,00	DAU		2 Unit	55.000.000,00
2	12	01.	2	07.	05.	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel	3 Jenis	110.000.000,00	DAU		3 Jenis	121.000.000,00
2	12	01.	2	07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	960.000.000,00	DAU		5 Jenis	1.056.000.000,00
2	12	01.	2	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		445.000.000,00				489.500.000,00
2	12	01.	2	08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	390 Lembar	10.000.000,00	DAU		390 Lembar	11.000.000,00
2	12	01.	2	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 Rekening	435.000.000,00	DAU		12 Rekening	478.500.000,00
2	12	01.	2	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.000.000,00				275.000.000,00
2	12	01.	2	09.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	3 Unit	115.000.000,00	DAU		3 Unit	126.500.000,00
2	12	01.	2	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik	85 Unit	70.000.000,00	DAU		85 Unit	77.000.000,00
2	12	01.	2	09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik	1 Gedung	15.000.000,00	DAU		1 Gedung	16.500.000,00
2	12	01.	2	09.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarpras gedung kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	50.000.000,00	DAU		5 Jenis	55.000.000,00
2	12	01.	2	13.		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi		154.000.000,00				159.400.000,00
2	12	01.	2	13.	03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi RB	1 Laporan	150.000.000,00	DAU		1 Laporan	155.000.000,00
2	12	01.	2	13.	05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan LPPD/LKP/LAKIP (SKPD)	1 Laporan	4.000.000,00	DAU		1 Laporan	4.400.000,00

2	12	03.	2	02.	01.	Koordinasi dengan Kantor yang menyelenggarakan Urusan Agama di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilannya Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian urusan yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilannya agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	1 Laporan	50.000.000,00	DAU		1 Laporan	55.000.000,00
2	12	03.	2	02.	04.	Pelayanan secara Aktif Peristiwa secara Aktif Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	267.000.000,00	DAU		1 Laporan	293.700.000,00
2	12	03.	2	02.	08.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	1 Laporan	150.000.000,00	DAU		1 Laporan	165.000.000,00
2	12	03.	2	03.	03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		75.000.000,00				82.500.000,00
2	12	03.	2	03.	04.	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Laporan	75.000.000,00	DAU		1 Laporan	82.500.000,00
2	12	04.				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.491.000.000,00			0	1.639.300.000,00
2	12	04.	2	01.		Pengumpulan Data dan Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database Kependudukan	Persentase Pengumpulan data dan Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database Kependudukan		488.000.000,00				536.000.000,00
2	12	04.	2	01.		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 OPD	488.000.000,00	DAU		1 OPD	536.000.000,00
							jumlah inovasi pelayanan adminduk Kependudukan	1 Inovasi	-				353.100.000,00
2	12	04.	2	02.		Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		321.000.000,00				353.100.000,00
2	12	04.	3	02.	01.	Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tata Cara Pelaksanaan, Evaluasi, Pemantauan, dan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	321.000.000,00	DAU		1 Dokumen	353.100.000,00

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dalam mendukung terwujudnya capaian rencana strategis sebagaimana rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4.1.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA	TARGET 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						12.075.014.523,00							13.261.715.974,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.075.014.523,00							13.261.715.974,00	
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						12.075.014.523,00							13.261.715.974,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	7.767.014.523,00						-	8.523.715.974,00	
2.12.01.2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	62.500.000,00						-	68.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-				4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	3.652.356.329,00			-	-	-	4.017.591.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyetoran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.340.356.329,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	3.674.391.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	13.000.000,00	-	-	-	-	-	14.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	3.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75 Paket	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	35 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Program E-Government	935.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.070.158.194,00	-	-	-	-	1.167.174.013,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			120.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	122.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket			130.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	143.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			95.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	104.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket			70.158.194,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	77.174.013,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen			5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			450.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			200.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.120.000.000,00			Program E-Governmen t	-	1.232.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Program E-Governmen t	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	110.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	960.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	1.056.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	445.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	-	489.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	380 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	478.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	250.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	-	275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	115.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	126.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perizinannya	85 Unit	70.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	77.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	154.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	-	159.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	4.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	1.775.000.000,00	-	-	-	-	1.952.500.000,00	-
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1.295.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	1.424.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1 Orang	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.140.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1.254.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	405.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	445.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	280.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	75.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. 2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	842.000.000,00			-	-	-	926.200.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	300.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Peningkatan Dokumentasi	Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Dilengkapi			1 Layanan	250.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	467.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	513.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	267.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen	293.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	75.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. 2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	1.491.000.000,00	-	-	-	-	1.639.300.000,00	-
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	488.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen	536.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	321.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen	353.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	321.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen	353.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	607.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	-	667.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	-	132.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	145.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	-	-	125.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	137.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	-	150.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen	-	-	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	-	-	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	Program E-Governmen t	-	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Laporan	-	-	75.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-	60 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	-	-	50 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			J U M L A H	-	-	-	-	12.075.014.523,00	-	-	-	-	-	-	13.261.715.974,00	

BAB V

PENUTUP

Upaya untuk merealisasikan strategi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan/dirumuskan tentunya akan dilaksanakan melalui APBD (DAU) Kabupaten Sambas dan APBN serta Dana lainnya yang diperkirakan menunjang relevansinya. Terkait hal tersebut, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, langkah awal yang dilakukan yaitu Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Untuk tahun 2025 program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas seluruhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Sambas yang berasal dari DAU.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sambas khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Harapan kami uraian ini dapat memperjelas arah pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akhirnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan alokasi dana untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sambas,

2024

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Hj. WAHIDAH, SE. M.Si.

NIP. 19680530 199403 2 005